



**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
3 s.d 5 DESEMBER 2015**

---

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur pada Tanggal 3 s.d 5 Desember 2015. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana kita ketahui, perekonomian nasional sedang mengalami perlambatan dimana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan III Tahun 2015 hanya sebesar 4,73%, meningkat jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2015 yang tumbuh 4,67%, namun melambat jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2014 yang tumbuh sebesar 4,92%. Pertumbuhan ekonomi yang melambat salah satunya didorong masih lemahnya investasi dan konsumsi Pemerintah yang disebabkan penyerapan APBN tidak secepat perkiraan. Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi Indonesia terkait erat dengan lesunya ekonomi global pada satu sisi dan rendahnya harga komoditas andalan Indonesia seperti karet, sawit, mineral dan batubara di pasar internasional.

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara) pada Triwulan III Tahun 2015 masih mengalami kontraksi sebesar -3,5% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,9% (yoy). Kontraksi perekonomian Kalimantan Timur disebabkan oleh kinerja sektor pertambangan yang semakin menurun ditengah perekonomian global yang belum membaik dan harga komoditas internasional yang semakin rendah, sehingga kinerja ekspor juga masih mengalami kontraksi.

Oleh karenanya Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga ingin mendapatkan informasi dan gambaran terkait pelaksanaan tugas dari Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Kalangan perbankan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

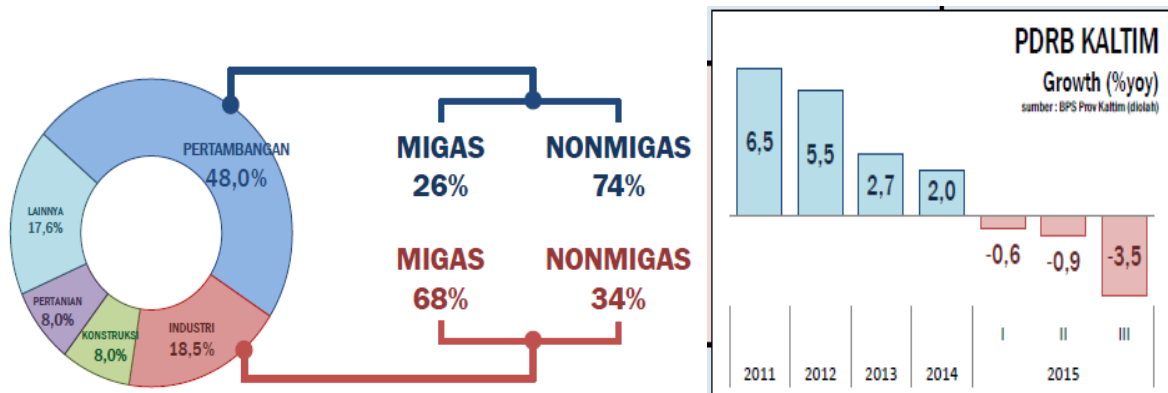
No.	No. Angg	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1.	410	Ir. Marwan Cik Asan, MM	F.PD	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
2.	185	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F. PDIP	Anggota
3.	189	Indah Kurnia	F. PDIP	Anggota
4.	242	Ir. H. M. Idris Laena	F. PG	Anggota
5.	295	H. Andi Achmad Dara, SE	F. PG	Anggota
6.	366	Ir. Sumail Abdullah	F. Gerindra	Anggota
7.	429	Evi Zainal Abidin, B. Comm	F. PD	Anggota
8.	480	Mohammad Hatta	F. PAN	Anggota
9.	74	Dr. Hj. Anna Mu'awanah	F. PKB	Anggota
10.	116	Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc	F.PKS	Anggota
11.	100	H. Ecky Awal Mucharam	F.PKS	Anggota
12.	540	Hj. Kasriah	F.PPP	Anggota
13.	11	H. Ahmad Sahroni, SE	F. Nasdem	Anggota
14.	545	Ir. Nurdin Tampubolon	F. HANURA	Anggota

## II. INFORMASI DAN TEMUAN

### A. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### 1. Gambaran Umum Perekonomian Kalimantan Timur

- Perekonomian Kalimantan Timur berkontraksi semakin dalam seiring dengan penurunan kinerja sektor pertambangan sebagai dampak melambatnya permintaan global dan tren harga komoditas yang menurun.
- Pada tahun 2014, perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertambangan sebesar 48%. Sektor pertambangan tersebut didominasi oleh pertambangan nonmigas dengan komoditas utamanya adalah batubara. Sementara untuk sektor industri pengolahan, sharenya hanya sebesar 18,5% dan didominasi oleh industri pengolahan minyak dan gas.



- Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kinerja perekonomian Kaltim dalam tren melambat. Bahkan sejak awal tahun 2015, kinerja perekonomian mengalami kontraksi.

Triwulanan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total
Tahun 2013	3,25	3,68	3,27	0,75	2,72
Tahun 2014	0,66	0,83	2,76	3,83	2,02
Tahun 2015	-0,56	-0,89	-3,49	...	...

- Kinerja perekonomian tahun 2015 yang menurun disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Dari sisi eksternal, melambatnya kinerja ekonomi Tiongkok dan dunia secara umum memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Kaltim. Penyebabnya adalah sebagian besar ekspor Kaltim memiliki ketergantungan yang cukup besar dari permintaan dari Tiongkok, terutama batubara. Tiongkok saat ini sedang melaksanakan berbagai action plan mereka terkait green economy dalam upaya memperbaiki kondisi

lingkungan akibat polusi yang sangat tinggi. Salah satu hal yang dilakukannya adalah dengan mengurangi impor batubara dari luar negeri yang yang berkualitas lebih rendah, dan mengutamakan produksi batubara domestik yang berkualitas lebih baik. Penurunan kinerja perekonomian Tiongkok juga tercermin dari Performance Manager Index (PMI) yang mengalami tren penurunan dan belum ada sinyal membaik.

- Selain itu, tren penurunan harga komoditas internasional, terutama harga batubara juga menambah tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia dan Kaltim. Pada triwulan III 2015, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tercatat 58,84 US\$/ton, menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya yang masih di kisaran 81 US\$/ton. Bahkan ke depan, harga batubara diperkirakan masih akan belum membaik, yang tercermin dari harga contract futures.
- Sementara itu, sekitar 50% struktur perekonomian Kaltim masih bergantung pada kegiatan ekspor, terutama ekspor batubara. Kondisi eksternal tersebut jelas berdampak pada kondisi Kaltim. Produksi batubara Kaltim baik dari perusahaan PKP2B maupun dari perusahaan IUP turun signifikan. Bahkan beberapa IUP tidak melanjutkan kegiatan produksi meski izin operasionalnya masih berlaku. Permintaan batubara dari Indonesia sendiri juga belum optimal.
- Domestic Market Obligation (DMO) pada triwulan III 2015 mencapai 19,0% atau turun jika dibandingkan triwulan sebelumnya 20,2%. DMO Kaltim hanya 12% dari total produksi batubara Kaltim. Rendahnya penyerapan DMO ini dikarenakan berbagai hal seperti jumlah PLTU dengan batubara sangat minimal, dan kegiatan industri pengolahan di Jawa yang juga sedang lesu.
- Di tengah pertumbuhan ekspor Kaltim yang negatif dan kinerja sektor pertambangan batubara yang negatif, kinerja sektor pertambangan (migas) menunjukkan arah yang sedikit membaik, terutama di subsektor pertambangan gas seiring dengan mulai beroperasinya beberapa blok migas di Jampang, South Mahakam sejak September 2015, di samping blok Mahakam yang terus berproduksi.
- Dari sisi domestik, menurunnya kinerja perekonomian pada tahun ini juga didorong oleh penyerapan fiskal yang lebih rendah dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Hal ini tak terlepas dari menurunnya dan bagi hasil. Selain itu, penyerapan fiskal yang rendah baik dari APBD, APBN Kementerian/Lembaga di Kaltim diakibatkan oleh berbagai permasalahan seperti perubahan nomenklatur, dan terhambatnya penyelesaian beberapa proyek infrastruktur.

- Sebaliknya, konsumsi rumah tangga dan investasi masih dapat tumbuh positif, sehingga menjadi penahan penurunan perekonomian lebih dalam. Kinerja sektor tersier di Kaltim terutama yang berkaitan dengan jasa-jasa justru mengalami peningkatan, khususnya yang terkait dengan UMKM.
- Untuk mendorong perekonomian Kaltim dapat tumbuh positif dan sustain, perlu adanya transformasi perekonomian dari yang berbasis sumber daya alam menuju industrialisasi dengan meningkatkan infrastruktur.
- Untuk mewujudkan hal tersebut, masih dijumpai beberapa kendala seperti tumpang tindih ketentuan, pembebasan lahan, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan.
- **Pertambangan**  
 Pertambangan memberikan andil tahunan terbesar terhadap penurunan ekonomi Kaltim Tw III 2015 (-4,78%). Penurunan kinerja pertambangan terutama bersumber dari pertambangan nonmigas dengan komoditas utama adalah batubara. Penurunan kinerja pertambangan batubara disebabkan karena melemahnya permintaan dunia serta harga komoditas yang rendah.
- **Industri**  
 Industri memberikan andil tahunan terhadap ekonomi Kaltim Tw III 2015 sebesar -0,2%. Walaupun demikian, kinerja industri terus mengalami perbaikan sejak awal tahun 2015. Perbaikan ini bersumber dari industri migas (LNG).
- **Pertanian**  
 Pertanian memberikan andil tahunan terhadap ekonomi Kaltim Tw III 2015 sebesar 0,2%. Namun demikian, pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perlambatan ini tidak lepas dari fenomena alam El Nino yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Timur.
- **Ekspor**  
 Ekspor berkontraksi pada Tw III 2015 dan memberikan andil tahunan terhadap perekonomian Kaltim sebesar -8,6%. Penurunan kinerja ekspor sejalan dengan melemahnya kinerja pertambangan batubara sebagai komoditas utama ekspor Kaltim. Sementara itu, kinerja ekspor komoditas lainnya menunjukkan perbaikan namun kontribusinya masih rendah, sehingga belum mampu mendongkrak kinerja ekspor Kaltim.

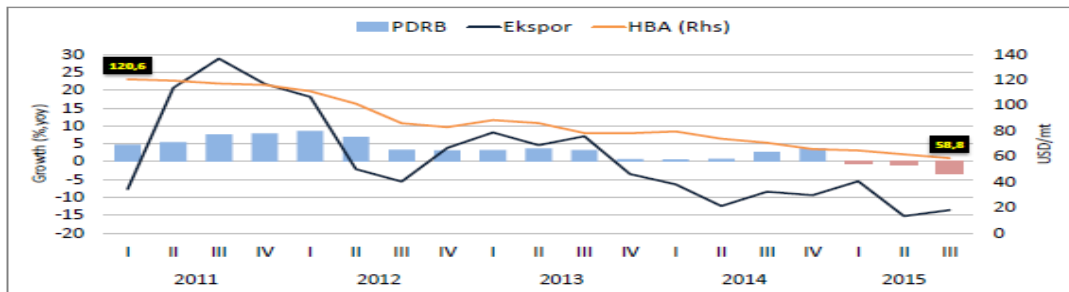
➤ **Investasi**

Investasi memberikan andil tahunan terhadap ekonomi Kaltim Tw III 2015 sebesar 2.7%. Baik investasi swasta maupun pemerintah menunjukkan peningkatan pada triwulan laporan. Investasi swasta masih terkonsentrasi pada sektor ekonomi ekstraktif.

➤ **Konsumsi pemerintah**

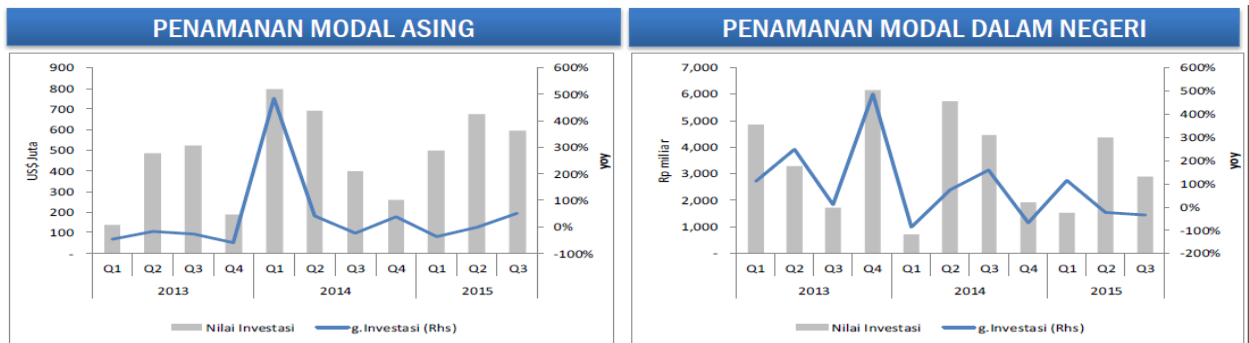
Konsumsi pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan pada Tw III 2015 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya serapan belanja operasional pemerintah pada periode laporan. Kekhawatiran pejabat dalam menggunakan anggaran serta perubahan nomenklatur beberapa kementerian menjadi salah satu alasan rendahnya serapan belanja pada Tw III 2015.

➤ Pada periode harga komoditas yang tinggi (2011-2012), pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat menyentuh angka 8,59% (yoy). Penurunan harga komoditas yang terjadi sejak tahun 2013 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2015. Arah pertumbuhan ekonomi Kaltim sejalan dengan pergerakan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai komoditas yang mendominasi ekspor Kaltim.



**a. Investasi Swasta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**

➤ Investasi swasta di Kalimantan Timur masih relatif stabil dengan kecenderungan meningkat.



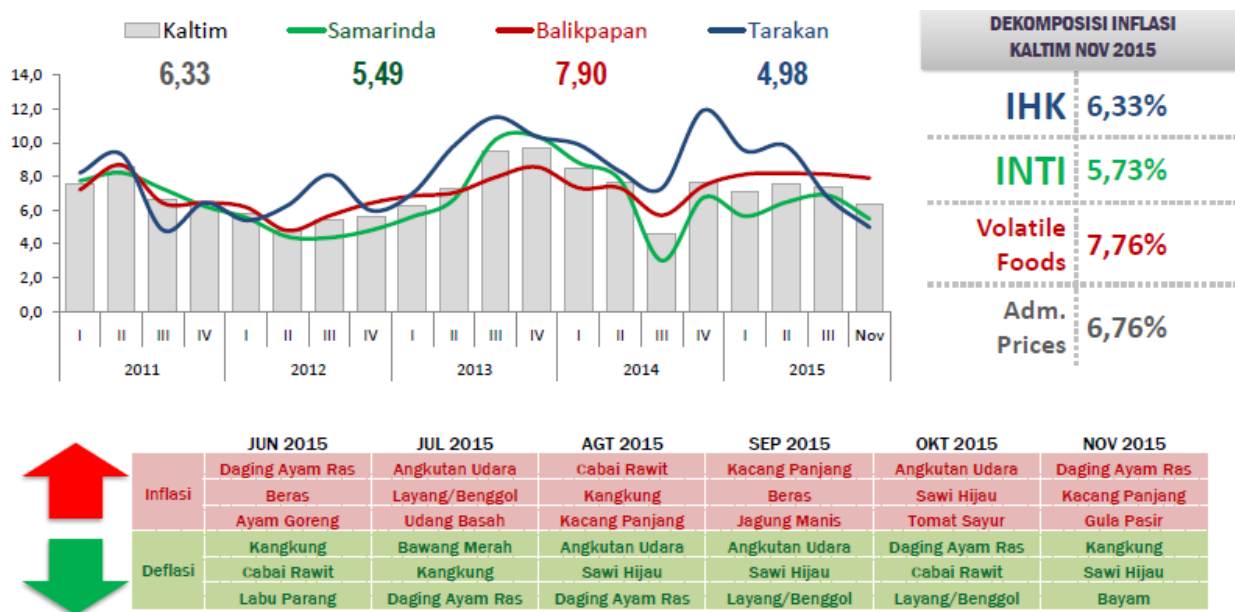
➤ Dalam 3 tahun terakhir, investasi PMA dan PMDN di Kaltim masih tumbuh positif. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya PMA. Indikator lain terkait investasi di Kaltim

menunjukkan bahwa impor barang modal dan kredit investasi sebenarnya berada pada tren penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, namun sejak pertengahan 2015 kondisinya sudah mulai membaik.

- Prospek investasi di tahun 2016 diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai proyek infrastruktur strategis oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## 2. Perkembangan Inflasi Kalimantan Timur

- Inflasi Kalimantan Timur terus mengalami penurunan sampai dengan November 2015 dan diperkirakan pada akhir tahun akan berkisar pada  $4\% \pm 1\%$  sesuai dengan target nasional.



Sumber data : BPS Provinsi Kaltim, diolah

- Kondisi inflasi Kaltim sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dan berada pada tren yang menurun. Pada tahun 2013, inflasi Kaltim mencapai 9,65% (yoy). Pada tahun 2014, inflasi menurun menjadi 7,66% (yoy). Dan berdasarkan asesmen Bank Indonesia, inflasi Kaltim akhir tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 4% (yoy).
- Penyumbang utama kenaikan inflasi pada tahun 2013 dan 2014 bersumber dari kenaikan harga energi (BBM, listrik, gas), sehingga mendorong kenaikan harga pada kelompok lainnya seperti pangan, sandang, dan jasa-jasa lainnya. Tahun 2015, penyebab inflasi bersumber dari

komoditas pangan, ini mengingat ketergantungan Kaltim terhadap sumber bahan pangan dari Provinsi lain.

➤ **Upaya pengendalian inflasi**

Berbagai hal telah dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi di Kaltim terutama dari sisi kelembagaan/koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat.

- Pemerintah daerah dan BI telah menghimbau kepada setiap kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara untuk membentuk TPID. Saat ini jumlah TPID di Kaltim dan Kaltara terdiri dari 2 TPID Provinsi dan 8 TPID Kabupaten/Kota. Masih terdapat 7 kab/kota yang belum terbentuk TPID yakni 2 di Kaltara dan 5 di Kaltim.
- Selama ini, koordinasi penanganan inflasi di Kaltim sudah semakin membaik. Awareness semakin meningkat ditambah dengan keterlibatan dari aparat penegak hukum (Polda dan Kodam) untuk melakukan pengawasan, pengamanan dan pengawalan terhadap kelancaran distribusi. Tidak hanya terhadap pasokan pangan saja tetapi juga sarana produksi seperti pupuk.
- Koordinasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Forkominda dan pertemuan TPID rutin.
- Untuk menjaga stabilitas pasokan, TPID juga telah mendorong Pemda untuk melakukan kerjasama perdagangan antar daerah baik dengan sesama kabupaten di dalam provinsi maupun dengan daerah di provinsi lain.
- Komunikasi kepada masyarakat mengenai pentingnya inflasi terus kami lakukan melalui berbagai media seperti papan informasi harga, website informasi harga, iklan di radio, dan berbagai talkshow maupun sosialisasi.

### **3. Kebijakan moneter dan makroprudensial**

Dalam menyikapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan rupiah terhadap valas, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai bauran kebijakan baik dari aspek moneter maupun aspek makroprudensial seperti penurunan GWM primer, penyesuaian LTV kendaraan bermotor maupun perumahan, bilateral *currency swap*, kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai dan nontunai, dll.



#### 4. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur

- ✓ Pada 2016, perekonomian Kaltim diperkirakan lebih baik dari kondisi tahun 2015. Perekonomian diperkirakan tumbuh positif yang didorong oleh berbagai faktor. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian akan didorong oleh konsumsi dan investasi yang meningkat. Kinerja ekspor diperkirakan masih lesu, namun arahnya membaik. Dari sisi penawaran, kinerja perekonomian diperkirakan masih ditopang oleh sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan.
- ✓ Laju inflasi Kaltim pada 2016 tetap diarahkan menuju ke inflasi yang rendah dan stabil, yakni pada kisaran 4%.

#### 5. Tantangan ekonomi

##### ✓ Eksternal

- Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Kaltim masih terus mengalami perlambatan.
- Semakin banyak negara yang menerapkan kebijakan "*green economy*" sebagai upaya mengurangi tingkat polusi dunia.
- Harga komoditas dunia masih berada dalam tren yang menurun.

##### ✓ Internal

- Kemampuan fiskal Pemerintah Daerah tahun 2016 lebih rendah dari periode sebelumnya.
- Komoditas ekspor Kaltim masih didominasi oleh komoditas pertambangan, belum terdiversifikasi.

### B. KANTOR OJK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### 1. Perkembangan Kinerja Perbankan di Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang tidak begitu tinggi secara nasional, demikian juga dengan kondisi perbankan di Kalimantan Timur.

TRILIUN Rp			
Keterangan	Desember 2014	Oktober 2015	Pertumbuhan (Ytd)
<b>Total Aset</b>	<b>115,4</b>	<b>116,1</b>	<b>0,6 %</b>
<b>Kredit</b>	<b>65,9</b>	<b>65,6</b>	<b>-0,4 %</b>
<b>DPK</b>	<b>89,5</b>	<b>90,5</b>	<b>1,1 %</b>

a. Berdasarkan jenis penggunaan

Miliar Rp						Okt 2015			
No	Jenis Penggunaan	2011	2012	2013	2014	Okt 2015	Pangsa	g (ytd)	g (yoy)
1	Modal Kerja	15.062	19.133	22.386	22.840	23.376	35,61%	2,34%	5,04%
2	Investasi	12.266	15.527	21.069	21.062	19.301	29,40%	-8,36%	-6,81%
3	Konsumsi	14.275	17.661	20.643	21.999	22.966	34,99%	4,40%	8,22%
<b>KALTIM</b>		<b>41.604</b>	<b>52.321</b>	<b>64.098</b>	<b>65.901</b>	<b>65.642</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>2,26%</b>

b. Berdasarkan sektor ekonomi

Miliar Rp						Okt 2015			
No	Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014	Okt 2015	Pangsa	g (ytd)	g (yoy)
1	Pertanian	1.973	2.992	3.699	4.529	3.724	5,67%	-17,79%	-16,51%
2	Pertambangan	2.314	2.756	3.141	3.909	3.439	5,24%	-12,02%	36,37%
3	Perindustrian	1.127	1.863	5.251	6.143	6.472	9,86%	5,36%	14,90%
4	Listrik, Gas dan Air	129	105	79	66	131	0,20%	98,02%	94,10%
5	Konstruksi	3.045	3.799	5.096	4.237	4.656	7,09%	9,87%	6,58%
6	Perdagangan	7.779	10.696	12.169	13.720	14.088	21,46%	2,68%	6,14%
7	Angkutan	3.196	4.718	5.520	4.500	3.916	5,97%	-12,99%	-24,63%
8	Jasa Dunia Usaha	4.522	5.699	6.624	4.864	4.574	6,97%	-5,95%	-16,90%
9	Jasa Sosial	1.473	1.486	1.862	1.733	1.596	2,43%	-7,92%	-10,77%
10	Lain-Lain	16.046	18.207	20.656	22.200	23.046	35,11%	3,81%	7,81%
<b>KALTIM</b>		<b>41.604</b>	<b>52.321</b>	<b>64.098</b>	<b>65.901</b>	<b>65.642</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>2,26%</b>

2. Dana Pihak Ketiga Bank Umum

➤ Berdasarkan wilayah dan jenis simpanan

Miliar Rp						Okt 2015			
No	Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	Okt 2015	Share	g (ytd)	g (yoy)
<b>KALTIM</b>		<b>66.311</b>	<b>79.992</b>	<b>85.407</b>	<b>89.468</b>	<b>90.486</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,14%</b>	<b>2,76%</b>
Jml Rekg (satuan)		2.600.968	2.942.817	3.430.524	3.694.511	3.824.834	100,00%	3,53%	5,60%
<b>TOTAL GIRO</b>		<b>17.476</b>	<b>25.781</b>	<b>22.110</b>	<b>22.578</b>	<b>21.036</b>	<b>23,25%</b>	<b>-6,83%</b>	<b>5,94%</b>
Jml Rekg (satuan)		59.422	61.474	63.971	63.417	64.430	1,68%	1,60%	1,83%
<b>TOTAL TABUNGAN</b>		<b>28.297</b>	<b>32.939</b>	<b>37.849</b>	<b>38.811</b>	<b>35.616</b>	<b>39,36%</b>	<b>-8,23%</b>	<b>-0,82%</b>
Jml Rekg (satuan)		2.487.862	2.824.868	3.306.912	3.567.844	3.692.267	96,53%	3,49%	5,60%
<b>TOTAL DEPOSITO</b>		<b>20.538</b>	<b>21.272</b>	<b>25.448</b>	<b>28.079</b>	<b>33.834</b>	<b>37,39%</b>	<b>20,50%</b>	<b>4,79%</b>
Jml Rekg (satuan)		53.684	56.475	59.641	63.250	68.137	1,78%	7,73%	9,64%

➤ LDR berdasarkan wilayah

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	Okt 2015
1	Kota Samarinda	66,35%	72,57%	83,92%	80,37%	74,75%
2	Kota Balikpapan	98,22%	99,79%	97,32%	96,81%	99,26%
3	Kota Tarakan	29,39%	29,15%	30,75%	32,61%	36,74%
4	Kota Bontang	52,79%	66,78%	106,06%	102,95%	115,99%
5	Kab. Kutai Kartanegara	25,85%	32,87%	51,20%	54,94%	54,49%
6	Kab. Berau	35,27%	35,95%	42,80%	37,47%	35,14%
7	Kab. Bulungan	16,11%	17,46%	18,31%	16,42%	19,16%
8	Kab. Kutai Barat	47,63%	25,12%	37,73%	33,16%	25,89%
9	Kab. Kutai Timur	41,59%	46,91%	53,93%	69,44%	49,92%
10	Kab. Malinau	23,26%	30,50%	27,21%	26,93%	71,06%
11	Kab. Nunukan	28,92%	28,70%	51,69%	64,85%	46,62%
12	Kab. Tana Paser	53,13%	51,17%	65,63%	54,62%	51,56%
13	Kab. Penajam Paser Utara	60,49%	50,44%	68,61%	65,14%	52,55%
14	Kab. Tana Tidung *)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>KALTIM</b>		<b>62,74%</b>	<b>65,41%</b>	<b>75,05%</b>	<b>73,66%</b>	<b>72,54%</b>

➤ Kredit lokal proyek berdasarkan sektor ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Rp Miliar					Okt 2015		
		2011	2012	2013	2014	Okt 2015	Pangsa	g (ytd)	g (yoy)
1	Pertanian	8.145	12.339	15.137	16.813	16.939	16,57%	0,75%	3,13%
2	Pertambangan	12.457	11.123	13.031	17.018	11.963	11,71%	-29,70%	-11,14%
3	Perindustrian	2.340	2.658	9.468	9.652	9.941	9,73%	3,00%	24,43%
4	Listrik, Gas dan Air	1.032	1.264	1.933	1.734	2.533	2,48%	46,08%	46,95%
5	Konstruksi	2.981	4.252	5.406	4.810	5.064	4,96%	5,30%	4,49%
6	Perdagangan	9.180	12.034	14.160	15.448	15.973	15,63%	3,40%	6,48%
7	Angkutan	4.509	6.312	8.278	7.141	6.329	6,19%	-11,37%	-22,36%
8	Jasa Dunia Usaha	6.461	7.917	9.538	8.256	7.042	6,89%	-14,71%	-17,65%
9	Jasa Sosial	1.475	1.488	1.918	1.795	1.674	1,64%	-6,72%	-9,16%
10	Lain-Lain	16.946	19.128	22.128	23.933	24.740	24,21%	3,37%	6,00%
<b>KALTIM</b>		<b>65.526</b>	<b>78.516</b>	<b>100.997</b>	<b>106.599</b>	<b>102.199</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4,13%</b>	<b>0,85%</b>

➤ Kredit UMKM berdasarkan sektor ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Miliar Rp					Okt 2015		
		2011	2012	2013	2014	Okt 2015	Share	g (ytd)	g (yoy)
1	Pertanian	1.110	1.312	1.417	1.832	2.918	13,44%	59,30%	62,34%
2	Pertambangan	594	272	301	549	557	2,56%	1,38%	94,02%
3	Perindustrian	569	443	454	551	648	2,99%	17,64%	29,96%
4	Listrik, Gas dan Air	49	39	39	40	101	0,47%	154,08%	159,82%
5	Konstruksi	1.321	2.198	2.895	2.733	2.761	12,72%	1,04%	-2,79%
6	Perdagangan	4.958	6.355	7.776	8.837	9.639	44,38%	9,07%	11,01%
7	Angkutan	1.098	1.231	1.322	1.200	1.272	5,86%	6,05%	-5,40%
8	Jasa Dunia Usaha	2.352	2.365	2.686	1.862	2.303	10,60%	23,65%	22,82%
9	Jasa Sosial	871	910	1.267	1.518	1.477	6,80%	-2,73%	-5,09%
10	Lain-Lain	1.122	650	198	129	42	0,19%	-67,89%	-55,72%
<b>KALTIM</b>		<b>14.043</b>	<b>15.775</b>	<b>18.355</b>	<b>19.252</b>	<b>21.718</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,81%</b>	<b>14,21%</b>

➤ **NPL Gross berdasarkan sektor ekonomi**

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	Okt 2015
1	Pertanian	0,82%	0,62%	0,70%	7,10%	5,14%
2	Pertambangan	2,07%	3,15%	3,72%	3,86%	10,56%
3	Perindustrian	0,98%	0,56%	0,30%	0,90%	0,40%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	0,40%	0,50%	1,38%
5	Konstruksi	4,68%	6,08%	20,92%	12,00%	15,92%
6	Perdagangan	2,10%	2,29%	2,21%	3,58%	4,83%
7	Angkutan	2,05%	1,88%	2,76%	10,22%	10,38%
8	Jasa Dunia Usaha	2,32%	3,62%	7,27%	8,83%	5,98%
9	Jasa Sosial	3,63%	3,76%	2,55%	11,70%	19,31%
10	Lain-Lain	1,43%	1,63%	1,51%	2,05%	2,70%
<b>KALTIM</b>		<b>2,00%</b>	<b>2,37%</b>	<b>3,88%</b>	<b>4,67%</b>	<b>5,51%</b>

### 3. Ketahanan Sistem Keuangan Kalimantan Timur

Kondisi ketahanan sistem keuangan di Kalimantan Timur pada sektor koperasi dan UMKM maupun rumah tangga masih lemah. Untuk sektor rumah tangga dikarenakan banyaknya PHK.

- **Loan to Deposit Ratio:** Dalam periode Desember 2014 ke periode Oktober 2015 mengalami penurunan dari 73,66% menjadi 72,54%, hal tersebut seiring peningkatan DPK sebesar 1,1 % dan penurunan kredit sebesar -0,4%.
- **NPL Gross:** Dalam periode Desember 2014 ke periode Oktober 2015 memburuk dari 4,67% menjadi 5,51%.
- **CAR (BPD Kaltim):** Dalam periode Desember 2014 ke periode Oktober 2015 mengalami penurunan dari 18,33% menjadi 16,88%.
- **AL/NCD:** Posisi Oktober 2015 sebesar 52,07% diatas threshold 50%.

### 4. Upaya yang dilakukan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan di Kalimantan Timur adalah dengan melakukan *prudential meeting* dengan BPD Kaltim sebagai berikut:

- Menghentikan dan/atau mengurangi pemberian kredit ke sektor ekonomi yang sedang memburuk (pertambangan, pelayaran dan perkebunan);
- Mendorong pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis;
- Mendorong penyaluran kredit UMKM terutama di sektor yang produktif.

## 5. Edukasi dan perlindungan konsumen

- Indeks literasi keuangan di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 16% dan Indeks inklusi keuangan sebesar 61%.
- Kegiatan edukasi yang telah dilakukan oleh OJK di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
  - ✓ Sosialisasi pasar modal syariah di Pesantren Hidayatullah dan Universitas Balikpapan;
  - ✓ Sosialisasi pelatihan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
  - ✓ Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM dan pembinaan pengawas LKM.

## C. KANTOR PERWAKILAN BPS KALIMANTAN TIMUR

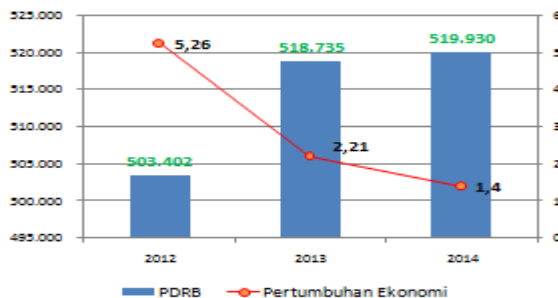
### 1. Jumlah Penduduk

Provinsi Kalimantan Timur sedang mengalami bonus demografi, hal ini ditunjukkan dengan dependency ratio yang kurang dari 50%, dimana penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun ditambah usia 65+). Dengan demikian penduduk Kalimantan Timur dapat dikategorikan penduduk usia muda (produktif).

<u>Jumlah Penduduk</u>	2013	2014	2015
0 - 14	949,690	960,419	969,293
15 - 64	2,174,828	2,299,305	2,358,620
65 +	46,621	91,708	98,725

### 2. Pendapatan Perkapita Penduduk

**PDRB Kaltim 2012-2014**  
(Trilyun rupiah)



**Pendapatan perkapita**  
(juta rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Pendapatan perkapita</u>
2012	145.92
2013	147.82
2014	146.52

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dari tahun 2012 – 2014 menunjukkan perlambatan.

Pendapatan perkapita dihitung dengan membandingkan nilai pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Akan tetapi nilai pendapatan regional belum tersedia karena

keterbatasan data *net factor income* (selisih pendapatan faktor produksi yang masuk ke Kaltim dengan yang keluar dari Kaltim), sehingga nilai pendapatan per kapita tidak tersedia. Sejauh ini pendekatan pendapatan per kapita yang dihitung dengan cara membandingkan nilai PDRB (atas dasar harga berlaku) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

### 3. Produk Domestik Regional Bruto

Sektor pertambangan dan penggalan masih mendominasi perekonomian Kalimantan Timur, namun perkembangannya semakin menurun.

#### PDRB Kaltim atas dasar harga berlaku (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	27.543.008	29.313.724	36.025.137
B	Pertambangan dan penggalan	287.478.745	286.098.532	259.169.351
C	Industri pengolahan	88.586.162	93.139.504	101.338.033
D	Pengadaan listrik, gas	110.176	107.497	118.358
E	Pengadaan air	170.318	184.953	197.645
F	Konstruksi	31.936.588	35.196.063	39.308.896
G	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	21.322.539	22.250.690	23.900.428
H	Transportasi dan pergudangan	11.593.657	12.588.534	16.101.327
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.118.897	3.427.190	3.797.899
J	Informasi dan komunikasi	4.781.092	5.171.006	5.678.471
K	Jasa keuangan	6.179.133	7.393.343	7.927.634
L	Real Estate	3.450.462	3.843.657	4.357.132
M,N	Jasa perusahaan	844.109	959.043	1.106.382
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8.236.642	8.864.434	10.031.379
P	Jasa pendidikan	4.368.346	5.215.151	6.312.772
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.865.832	2.031.393	2.324.500

R,S,T,U	Jasa lainnya	1.827.328	1.950.147	2.234.598
<b>PDRB atas dasar harga berlaku</b>		<b>503.402.032</b>	<b>518.734.861</b>	<b>519.929.944</b>
<b>PDRB atas dasar harga konstan</b>		<b>428.877.711</b>	<b>438.354.720</b>	<b>444.494.312</b>

#### 4. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2011 terus menurun, bahkan sampai dengan triwulan III tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai angka -1,65%. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif.

#### Laju pertumbuhan PDRB Kaltim atas dasar harga konstan 2010

Tahun 2012 - 2014 (%)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	7,62	5,92	4,41
B	Pertambangan dan penggalian	8,01	1,73	(0,69)
C	Industri pengolahan	(3,49)	(1,53)	0,28
D	Pengadaan listrik, gas	13,27	3,64	17,14
E	Pengadaan air	2,63	6,26	4,55
F	Konstruksi	6,21	4,91	5,95
G	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	5,59	2,99	4,27
H	Transportasi dan pergudangan	7,25	7,70	8,35
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	9,68	3,46	4,96
J	Informasi dan komunikasi	12,10	9,11	9,65
K	Jasa keuangan	12,46	14,46	2,60
L	Real Estate	8,27	8,23	8,15
M,N	Jasa perusahaan	8,54	8,22	10,31

O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,89	3,13	9,47
P	Jasa pendidikan	19,09	18,74	15,78
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,43	5,12	9,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,66	2,72	6,78
<b>PDRB</b>		<b>5,26</b>	<b>2,21</b>	<b>1,40</b>

## 5. Inflasi

Kondisi inflasi di Kalimantan Timur tahun 2013 – 2015 terlihat seiring dengan kondisi inflasi nasional tetapi cenderung lebih tinggi kecuali tahun 2014. Lonjakan-lonjakan inflasi terjadi pada momen-momen nasional seperti hari raya keagamaan, liburan sekolah dan tahun ajaran baru, pergantian tahun baru dll, dan terjadi pada saat perubahan kebijakan terkait pengurangan subsidi BBM. Pada tahun 2013 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus yaitu masing-masing 1,11%, 3,79%, dan 1,78%. Hal ini disebabkan oleh pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM rata-rata sekitar 44% pada bulan Juni 2013 dan dilanjutkan dengan masuknya bulan ramadhan serta hari raya idul fitri.

Pada tahun 2014 terjadi lonjakan inflasi di bulan Juni tetapi tidak begitu tinggi yaitu 0,89% dikarenakan memasuki bulan ramadhan dan hari raya idul fitri yang terjadi pada bulan juli tahun 2015. Kemudian terjadi lonjakan yang tinggi ada akhir tahun dikarenakan adanya pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan inflasi bula november sebesar 1,18% dan bulan desember sebesar 2,44%. Sedangkan tahun 2015 inflasi relatif rendah namun tetap diatas nasional.

## 6. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) di Kalimantan Timur secara umum masih dibawah 100, hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan petani untuk proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih lebih besar daripada pendapatan yang diterima dari hasil pertanian. Mereka harus mencukupi kebutuhannya dengan mencari penghasilan dari sumber lain diluar sektor pertanian atau



*mixed farming*. Apabila dilihat menurut subsektor, subsektor peternakan dan perkebunan rakyat yang memiliki NTP lebih tinggi dibanding ketiga subsektor yang lain.

## **7. Upah Minimum Regional (UMR)**

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan dari tahun 2013 -2016. Rata-rata mengalami kenaikan sebesar 7%. Khusus untuk tahun 2016 UMP di Kalimantan Timur masih berdasarkan KHL (tidak sesuai dengan PP 78 Tahun 2015).

## **8. Indeks Ketimpangan Pendapatan**

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Peningkatan pendapatan yang tinggi akan sedikit manfaatnya bagi masyarakat banyak apabila tingkat pemerataannya rendah, bahkan memungkinkan timbulnya eksese negatif berupa kerawanan sosial jika kesenjangan antara kayadan miskin semakin lebar.

Data nilai pendapatan riil yang diterima masyarakat secara teknis sangat sulit diperoleh sehingga didekati dengan data pengeluaran rumah tangga. Sedangkan indikator untuk melihat distribusi pendapatan (pengeluaran) serta aspek pemerataan melalui kriteria bank dunia dan gini rasio.

## **9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat, yang dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Secara umum capaian IPM Kalimantan Timur tergolong kategori tinggi (antara 70 – 80), dimana IPM tertinggi adalah Kota Bontang sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Secara nasional, IPM Kalimantan Timur menduduki peringkat 3 setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Provinsi lain yang capaian IPM-nya termasuk kategori tinggi (antara 70 – 80) adalah Provinsi Kepulauan Riau, Bali dan Palu.

## **10. Elastisitas pertumbuhan ekonomi**

### **a. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan pengangguran**

Pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam penurunan pengangguran. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kaltim memang mengalami perlambatan. Hal tersebut

berpengaruh terhadap kecepatan penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah pengangguran yang semakin melambat, dimana pada tahun 2014 setiap pertumbuhan ekonomi 1% mampu menurunkan penganggur sebanyak 5.994 jiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana tiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% mampu menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 7.333 jiwa.

**b. Elastisitas inflasi terhadap angka kemiskinan**

Inflasi yang tidak terkendali memang akan menimbulkan instabilitas dalam perekonomian nasional. Namun demikian, inflasi juga diperlukan untuk menggerakkan perekonomian yang nantinya berdampak juga terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dengan demikian, inflasi tetap harus dikendalikan supaya perekonomian tetap terjaga, dan angka kemiskinan serta pengangguran dapat ditekan. Elastisitas inflasi terhadap angka kemiskinan di Kaltim menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi 1% dapat menambah jumlah penduduk miskin sekitar 0,11% – 0,21%.

Secara teoritis kenaikan angka inflasi akan meningkatkan angka kemiskinan karena garis kemiskinan juga akan naik. Diduga angka kemiskinan Kaltim telah memasuki *hardcore poverty* dimana angka kemiskinannya dalam berapa tahun bertahan pada kisaran 6%. Dengan demikian angka inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan.

**11. Upaya BPS Provinsi Kalimantan Timur agar data-data yang disajikan kepada TPID berkualitas dan akurat**

Tugas pengumpulan statistik dasar pemerintah di Indonesia dilaksanakan oleh BPS sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Menyadari BPS sebagai wadah rujukan, maka BPS senantiasa berusaha terus meningkatkan kualitas data, termasuk data inflasi yang dibutuhkan oleh TPDI. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data inflasi antara lain:

- Pendataan harga mingguan, dua mingguan, bulanan untuk menghasilkan data inflasi, haruslah berdasarkan SOP (*standar perasional*) pendataan yang telah ditetapkan
- Setiap data yang dihasilkan berdasarkan pemeriksaan/pengawasan, maupun proses klarifikasi di lapangan.
- Menjunjung tinggi prinsip independensi petugas pengumpulan data, sehingga hasilnya dapat dipercaya menggambarkan fenomena sebenarnya.

- Petugas yang dipilih untuk mendata melalui proses seleksi dan pelatihan serta berbentuk tim sehingga diyakini petugas pendata adalah yang berkualitas dan kompeten.
- Pada tahun 2016, akan diberlakukan proses pengolahan data inflasi berbasis web, sehingga proses pengolahan pusat-daerah semakin mudah dan cepat.
- BPS telah menyediakan metodologi yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS kabupaten/kota untuk menghitung inflasi Kab/Kota Non SBH.

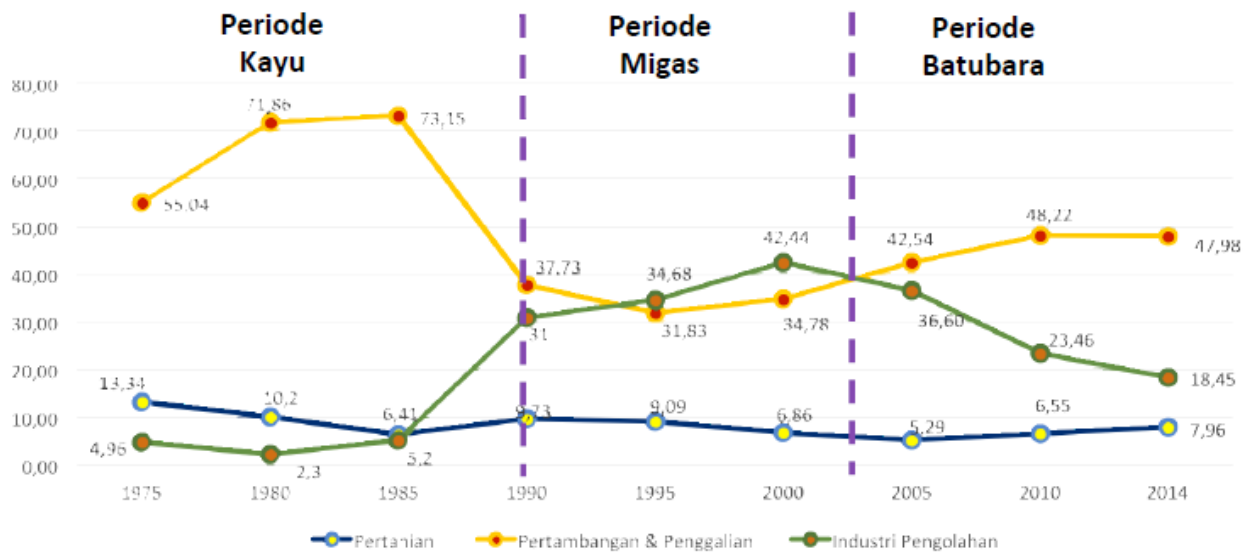
## **12. Koordinasi yang dilakukan BPS kepada TPID**

- Untuk menjaga independensi, kedudukan BPS adalah sebagai narasumber dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- Dalam TPID tersebut BPS berperan :
  - Menyampaikan rilis/laporan setiap awal bulan mengenai data tingkat inflasi dan data kondisi perekonomian lainnya ke Pemerintah Daerah dan TPID.
  - Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah.
  - Aktif memberikan masukan/informasi dalam setiap forum TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
  - Rekomendasi dalam upaya pengendalian harga terkait tinggi rendahnya tingkat inflasi di Kalimantan Timur.

## **D. PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

### **1. Outlook Perekonomian Kalimantan Timur**

### Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (%)



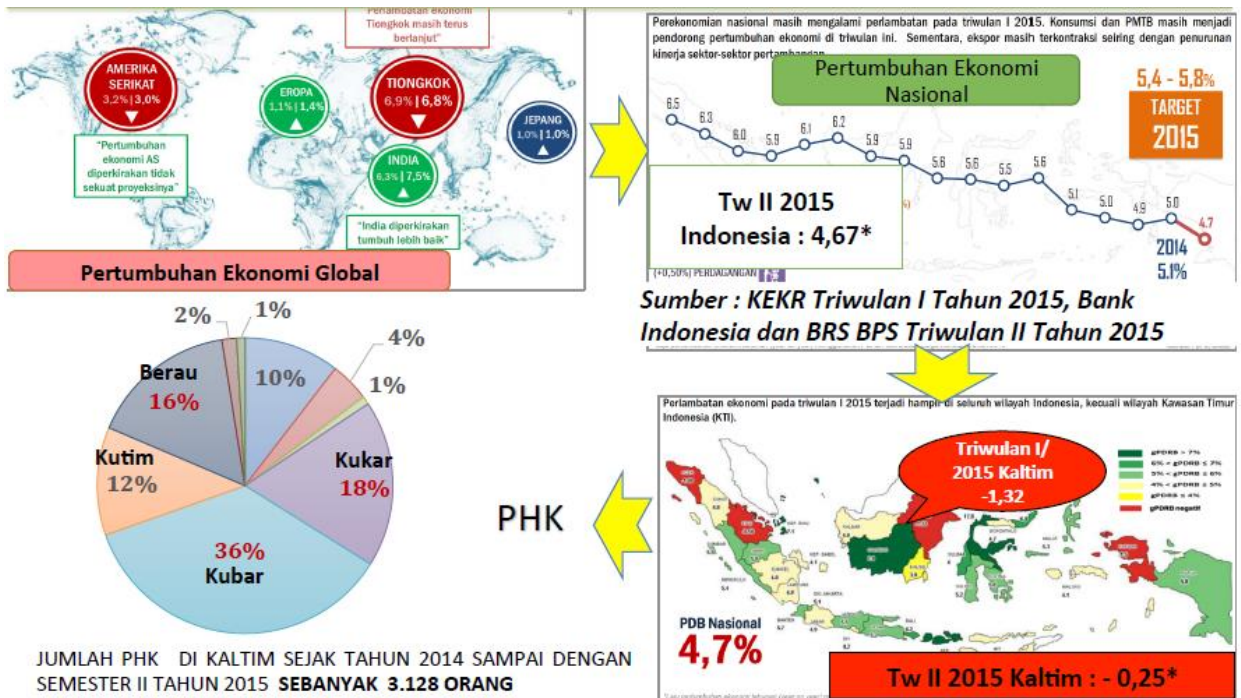
- Sektor industri pengolahan dengan migas mulai menunjukkan tren penurunan;
- Sektor pertanian bergerak lambat dan cenderung stagnan;
- Sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, namun meskipun demikian sejak tahun 1995 menunjukkan peningkatan signifikan dan saat ini mendominasi ekonomi Kaltim;
- Dominasi sektor primer (migas dan pertambangan) dalam struktur ekonomi daerah tidak berkorelasi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor industri (manufaktur).

## 2. Sasaran makro RPJMD Kaltim Tahun 2013 – 2018

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL 2013	2014		TARGET RKPd TAHUNAN				TARGET 2018
			TARGET	CAPAIAN	2015	CAPAIAN*	2016	2017	
1.	PDRB (Rp. Triliun)	425,43	401,77	492,18	419,45	138,2	439,58	461,56	462,16
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,59	2,85	2,02	4,40	-1,65	4,80	5,00	4,7 - 5,3
3.	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7,54	7,53	7,00	7,50	6,50	6,00	5,11
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,06	6,42	6,42	5,75	6,23	5,35	5,36	5,00
5.	IP M	76,71	77,01	..	77,14	77,33	77,28	77,42	78
6.	Laju Inflasi (%)	9,65	6,77	5,10	6,30	7,65	6,70	5,90	5,50
7.	Investasi (Rp.Triliun)	30,89	30,87	30,86	35,00	10,3	37,00	40,00	44,19
8.	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	78,29	75,24	79,24	75,24	80,19	81,14	82,00

### 3. Perlambatan ekonomi

Sektor basis yang merupakan faktor determinan (penentu) pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah sektor migas dan batubara. Sektor ini sangat terpengaruh oleh situasi ekonomi global terutama negara-negara tujuan ekspor Kaltim.



### 4. Pertumbuhan ekonomi

Fenomena pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dipengaruhi antara lain:

- ✓ Turunnya harga komoditi andalan ekspor Kaltim;
- ✓ Melemahnya pertumbuhan ekonomi negara tujuan utama ekspor Kaltim sehingga permintaan terhadap produk dari Kaltim ikut menurun;
- ✓ Turunnya produksi komoditi SDA *nonrenewable* yang belum mampu diimbangi oleh peningkatan produksi komoditi lainnya;
- ✓ Inflasi yang cukup tinggi sebagai salah satu dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah sedangkan kegiatan ekonomi Kaltim sangat bergantung pada produk impor;
- ✓ Rantai NTB yang masih pendek;
- ✓ Kualitas pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal;
- ✓ Penurunan ekonomi berbasis SDA *unrenewable* lebih cepat daripada kenaikan ekonomi berbasis SDA *renewable*.

**Kualitas pertumbuhan ekonomi:**

<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Rata2</b>
Pertambahan penduduk bekerja (org)	109.105	28.115	5.154	53.194	48.892,00
Rata2 pertambahan pekerja per 1% pertumbuhan ekonomi (org)					<b>11.720</b>
Pertambahan/pengurangan pengangguran (org)	7.136	(15.430)	(16.205)	(8.425)	(8.231,00)
Rata2 penurunan pengangguran per 1% pertumbuhan ekonomi (org)					<b>(1.973)</b>
Pertambahan/pengurangan pddk miskin (org)	4.130	(1.020)	9.800	(3.230)	2.420,00
Rata2 penurunan pdk miskin per 1% pertumbuhan ekonomi (%)					<b>580</b>

Korelasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan peringkat IPM Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan IPM suatu daerah.

- ✓ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya dapat terjadi jika didukung oleh struktur ekonomi daerah yang kuat bersumber dari potensi daerah yang berkelanjutan dan bersifat padat karya (intensif labour).
- ✓ Struktur ekonomi Kalimantan Timur hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan dimana sektor ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan tidak bersifat padat karya.
- ✓ Disisi lain distribusi pendapatan juga masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, hal ini diindikasikan dengan Indeks Gini tahun 2014 sebesar 0,35.
- ✓ Selain itu kemiskinan dan pengangguran di Kaltim juga merupakan kontribusi dari migrasi penduduk yang tinggi 3,8% pada tahun 2014, hal ini disebabkan migrasi tersebut pada umumnya unskill dan berpendidikan rendah.
- ✓ Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur masih belum berkorelasi positif terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- ✓ Selanjutnya berkenaan dengan tingkat IPM merupakan pencapaian atas 3 komponen utamanya yaitu : 1) usia harapan hidup, 2) pendidikan dan 3) pendapatan per kapita. Pada tahun 2013 Kalimantan Timur menduduki peringkat ke 4 secara Nasional. Hal ini sebagai indikasi bahwa IPM memperoleh pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi.

## **5. Efektivitas dan efisiensi transfer daerah**

Penyelenggaraan Desentralisasi memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi Pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal bila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pembauran sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Sesuai dengan pasal 5 UU No. 33 / 2004, Sumber pendapatan daerah dalam angka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dana pendapatan lainnya yang sah.

Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan dana perimbangan keuangan pada daerah otonomi, pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang saat ini terjadi pada dana perimbangan yang daerah terima setiap tahun semakin menurun.

Kendala-kendala yang terjadi :

- i. Memperbaiki mekanisme pengeluaran Anggaran transfer ke daerah dimaksudkan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi pengeluaran.
- ii. Memperbaiki formulasi perhitungan untuk daerah penghasil. Karena selama ini transfer ke daerah yang diterima Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun.
- iii. Adanya dana pendamping sangat membebani daerah dan tidak ada dalam indikator kebutuhan fiskal DAU.
- iv. Transfer DBH SDA yang dinilai tidak transparan dari Pemerintah pusat/Kementerian Keuangan, jumlah yang diberikan ke Provinsi Kalimantan harus dibagi ke daerah Kabupaten/kota.

#### **6. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi**

Faktor-faktor yang dinilai menjadi penghambat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kaltim :

- i. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaltim masih secara dominan dipengaruhi oleh investasi yang bersifat padat modal. Dalam hal ini, bahwa sektor migas dan pertambangan yang merupakan sektor dominan pembentuk PDRB.
- ii. Rantai nilai tambah sektor pertanian yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja masih sangat sedikit digunakan sebagai input bagi sektor industri.
- iii. Faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya daya beli masyarakat adalah rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk di Kaltim, yaitu 44 juta rupiah.

### **III. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut:

- a. Komisi XI DPR RI meminta kepada jajaran Bank Indonesia, OJK dan BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah terus mendorong pengembangan sektor UMKM dapat berperan dalam perekonomian daerah.



- c. Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan usulan terkait Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengingat Provinsi Kalimantan Timur memiliki SDA yang besar namun tingkat pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah bahkan negatif.
- d. Komisi XI DPR RI mendukung Pemerintah Daerah untuk terus mendorong peningkatan dan pengembangan SDM di Provinsi Kalimantan Timur sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada SDA yaitu minyak.
- e. Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan IPM di Kalimantan Timur dengan mendirikan universitas teknologi.
- f. Komisi XI DPR RI meminta kepada jajaran Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang ada di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong perusahaan-perusahaan tambang melakukan reklamasi atas lahan tambang yang ada sehingga tidak merusak lingkungan.
- g. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan baik oleh Bank Indonesia, OJK, BPS maupun Pemerintah Daerah dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Kalimantan Timur, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

**Jakarta, Desember 2015**

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Ketua,**

**Ir. MARWAN CIK ASAN, MM**

**A- 410**